

BAB III

PERUBAHAN SOSIAL DAN PEMBANGUNAN

Pengantar

Bab ini diberi judul “Perubahan Sosial dan Pembangunan”. Bab ini merupakan satu rangkaian dalam penguasaan kompetensi untuk mengkaji masalah-masalah lingkungan sosial budaya dan teknologi. Bab ini memberikan dasar pemahaman dalam menguasai konsep-konsep perubahan sosial dan pembangunan. Dengan pemahaman konsep dasar tentang: perubahan sosial, bentuk/teori perubahan sosial, faktor penyebab perubahan sosial, konsep pembangunan dan modernisasi, contoh pembangunan dalam bidang kependudukan, kependidikan, dan ketenagakerjaan. Dengan mempelajari bab ini diharapkan Anda dapat memudahkan untuk mengkaji masalah-masalah lingkungan sosial budaya dan teknologi dalam konteks perkuliahan PLSBT. Secara umum hasil belajar yang akan dicapai setelah mempelajari bab ini ialah :

1. Menjelaskan beberapa konsep perubahan sosial dari beberapa ahli.
2. Menjelaskan konsep pembangunan dan modernisasi
3. Memberikan contoh permasalahan pembangunan bidang kependudukan, kependidikan, dan ketenagakerjaan.

Secara khusus, setelah pembelajaran ini anda diharapkan : dapat menguasai beberapa pengertian perubahan sosial, menjelaskan teori perubahan sosial klasik dan kontemporer, menjelaskan faktor-faktor pendorong perubahan sosial, menjelaskan konsep pembangunan dan modernisasi, syarat dan ciri-ciri modernisasi, menjelaskan konsep dan permasalahan pembangunan kependudukan, menjelaskan peranan pendidikan dalam mengatasi kesenjangan sosial, menjelaskan pembangunan dalam bidang ketenagakerjaan. Bab ini terbagai dalam tiga (3) bagian yaitu :

1 : Perubahan Sosial.

2 : Pembangunan dan Modernisasi.

3 : Konsep dan Permasalahan Pembangunan Bidang Kependudukan, Kependidikan dan Ketenagakerjaan

Ruang lingkup yang terkandung dalam isi bab ini menyangkut beberapa hal, sebagai berikut:

- a. Pengertian Perubahan Sosial
- b. Teori dan Cakupan Perubahan Sosial
- c. Faktor Penyebab Perubahan Sosial

- d. Konsep Pembangunan dan Modernisasi
- e. Syarat dan Ciri-Ciri Modernisasi
- f. Permasalahan Budaya yang Menghambat Pembangunan
- g. Konsep dan Permasalahan Dalam Pembangunan Kependudukan, Kependidikan, dan Ketenagakerjaan.

1 . Perubahan Sosial

A. Pendahuluan

Setiap masyarakat senantiasa berada dalam proses perubahan sosial dengan kata lain perubahan sosial merupakan gejala yang melekat disetiap kehidupan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari kehidupan yang terjadi dalam masyarakat Indonesia, dimana pada masa lalu dalam kehidupan keluarga seorang suami merupakan tulang punggung keluarga dan mempunyai posisi yang dominant dalam berbagai urusan yang terjadi di rumah tangga, termasuk juga dalam hal ekonomi keluarga, sehingga apabila suami tidak bekerja maka suatu keluarga secara ekonomi akan mengalami kesulitan. Sedangkan dalam masyarakat modern saat ini posisi seorang suami tidak terlalu dominan.

Perubahan-perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat dapat diketahui dengan cara membandingkan keadaan masyarakat pada waktu tertentu dengan keadaan di masa lampau. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat akan menimbulkan ketidaksesuaian antara unsur-unsur sosial yang ada pada masyarakat. Sehingga akan mengubah struktur dan fungsi dari unsure-unsur sosial masyarakat tertentu.

Permasalahan selanjutnya yang akan dibahas dalam bab ini adalah modernisasi. Modernisasi merupakan persoalan-persoalan yang berhubungan erat dengan pembagian kerja, aktivitas untuk mengisi waktu-waktu senggang dan sebagainya. Awal proses modernisasi biasanya berupa industrialisasi yang dampak negatifnya dapat menimbulkan pengangguran, mulai pudarnya nilai dan norma serta upacara tradisi pada masyarakat dan sebagainya.

Modernisasi pada hakekatnya atau dalam pelaksanaannya menggunakan unsur-unsur yang datang dari masyarakat luar. Terkadang kita selalu keliru dalam membedakan modernisasi dengan westernisasi. Sebetulnya yang membedakan kedua istilah tersebut adalah dalam prosesnya dimana modernisasi pada hakekatnya menggunakan teknologi dan ilmu

pengetahuan yang berasal dari barat. Sedangkan westernisasi adalah segala hal tata cara kehidupan kebarat-baratan.

Berikut akan dibahas lebih lanjut bagaimana perubahan sosial : pengertian dan cakupan perubahan social, Teori perubahan sosia , dan penyebab perubahan social.

B. Perubahan Sosial

1. Pengertian dan Cakupan Perubahan Sosial

Perubahan sosial merupakan gejala yang melekat di setiap masyarakat. Perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat akan menimbulkan ketidaksesuaian antara unsure-unsur sosial yang ada di dalam masyarakat, sehingga menghasilkan suatu pola kehidupan yang tidak sesuai fungsinya bagi masyarakat yang bersangkutan.

Suatu masyarakat yang telah mencapai peradaban tertentu, berarti telah mengalami evolusi kebudayaan yang lama dan bermakna sampai tahap tertentu yang diakui tingkat IPTEK dan unsure budaya lainnya. Dengan demikian , masyarakat tadi telah mengalami proses perubahan social yang berarti, sehingga taraf kehidupannya makin kompleks. Proses tersebut tidak terlepas dari berbagai perkembangan , perubahan, dan pertumbuhan yang meliputi aspek-aspek demografi, ekonomi, organisasi, politik, IPTEK, dan lainnya. Menurut Nursid Sumaatmadja “*Perubahan segala aspek kehidupan, tidak hanya dialami, dihayati, dan dirasakan oleh anggota masyarakat, melainkan telah diakui serta didukungnya. Jika proses tersebut telah terjadi demikian, maka dapat dikatakan bahwa masyarakat tersebut telah mengalami “perubahan social”*”. Pada masyarakat tersebut, struktur, organisasi, dan hubungan sosial telah mengalami perubahan. Dapat disimpulkan bahwa perubahan social mencakup tiga hal, yaitu :

- a. Perubahan dalam struktur sosial
- b. Perubahan organisasi sosial
- c. Perubahan hubungan sosial.

Wilbert Moore memandang perubahan sosial sebagai “perubahan struktur sosial, pola perilaku dan interaksi sosial”. *Setiap perubahan yang terjadi dalam struktur masyarakat atau perubahan dalam organisasi sosial disebut perubahan sosial*. Perubahan sosial berbeda dengan perubahan kebudayaan. Perubahan kebudayaan mengarah pada perubahan unsur-unsur kebudayaan yang ada. Contoh perubahan sosial: perubahan peranan seorang isteri dalam keluarga modern, perubahan kebudayaan contohnya: adalah penemuan baru seperti radio, televisi, computer yang dapat mempengaruhi lembaga-lembaga sosial.

William F. Ogburn mengemukakan bahwa ruang lingkup perubahan-perubahan sosial mencakup unsur-unsur kebudayaan yang materiil maupun immaterial dengan menekankan bahwa pengaruh yang besar dari unsure-unsur immaterial. Kingsley Davis mengartikan *perubahan sosial sebagai perubahan yang terjadi dalam fungsi dan struktur masyarakat*. Perubahan-perubahan sosial dikatakannya sebagai perubahan dalam hubungan sosial (social relationship) atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan (equilibrium) hubungan sosial tersebut.

Gillin dan Gillin mengatakan bahwa perubahan-perubahan sosial untuk suatu variasi cara hidup yang lebih diterima yang disebabkan baik karena perubahan dari cara hidup yang lebih diterima yang disebabkan baik karena perubahan kondisi geografis, kebudayaan materiil, kompetisi penduduk, ideology, maupun karena adanya difusi ataupun perubahan-perubahan baru dalam masyarakat tersebut.

Menurut Selo Soemardjan, *perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap dan pola perilaku diantara kelompok dalam masyarakat*. Menurutnya, antara perubahan sosial dan perubahan kebudayaan mamiliki satu aspek yang sama yaitu keduanya bersangkutan paut dengan suatu penerimaan cara-cara baru atau suatu perbaikan cara masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.

Perubahan sosial itu bersifat umum meliputi perubahan berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat, sampai pada pergeseran persebaran umur, tingkat pendidikan, dan hubungan antar warga. Dari perubahan aspek-aspek tersebut terjadi perubahan struktur masyarakat serta hubungan social.

Perubahan sosial tidak dapat dilepaskan dari perubahan kebudayaan. Hal ini disebabkan kebudayaan merupakan hasil dari adanya masyarakat, sehingga tidak akan ada kebudayaannya apabila tidak ada masyarakat yang mendukungnya dan tidak ada satupun masyarakat yang tidak memiliki kebudayaan.

Perubahan sosial yaitu perubahan yang terjadi dalam masyarakat atau dalam hubungan interaksi, yang meliputi berbagai aspek kehidupan. Sebagai akibat adanya dinamika anggota masyarakat, dan yang telah didukung oleh sebagian besar anggota masyarakat, merupakan tuntutan kehidupan dalam mencari kesetabilannya. Ditinjau dari tuntutan stabilitas kehidupan perubahan sosial yang dialami masyarakat adalah hal yang wajar. Kebalikannya masyarakat yang tidak berani melakukan perubahan-perubahan, tidak akan dapat melayani tuntutan dan dinamika anggota-anggota yang selalu berkembang kemauan dan aspirasi.

Cara yang paling sederhana untuk memahami terjadinya perubahan sosial dan budaya adalah membuat rekapitulasi dari semua perubahan yang terjadi dalam masyarakat sebelumnya. Perubahan yang terjadi dalam masyarakat dapat di analisis dari berbagai segi:

- Kearah mana perubahan dalam masyarakat bergerak (*direction of change*) bahwa perubahan tersebut meninggalkan factor yang diubah. Akan tetapi setelah meninggalkan factor tersebut, mungkin perubahan itu bergerak kepada sesuatu yang baru sama sekali, akan tetapi mungkin pula bergerak kearah suatu bentuk yang sudah ada pada waktu yang lampau.
- Bagaimana bentuk dari perubahan-perubahan sosial dan kebudayaan yang terjadi dalam masyarakat.

Perubahan sosial bisa terjadi dengan cara :

1. Direncanakan (*planned*) atau /dan tidak direncanakan (*unplanned*).
2. Menuju kearah kemajuan (*progressive*) atau/ dan kemunduran (*regressive*).
3. Bersifat positif atau negative.

Menurut Soerjono Soekanto bentuk-bentuk perubahan sosial dapat terjadi dengan beberapa cara, seperti :

1. Perubahan yang terjadi secara lambat dan perubahan yang terjadi secara cepat.
 - a. Perubahan secara lambat disebut evolusi, pada evolusi perubahan terjadi dengan sendirinya, tanpa suatu rencana atau suatu kehendak tertentu. Perubahan terjadi karena usaha-usaha masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan keperluan, keadaan, dan kondisi-kondisi baru yang timbul dengan pertumbuhan masyarakat.
 - b. Perubahan secara cepat disebut revolusi. Dalam revolusi, perubahan yang terjadi direncanakan lebih dahulu maupun tanpa rencana.
2. Perubahan yang pengaruhnya kecil, dan perubahan yang pengaruhnya besar.
 - a. perubahan yang pengaruhnya kecil adalah perubahan pada unsure struktur sosial yang tidak bisa membawa pengaruh langsung atau pengaruh yang berarti bagi masyarakat.
 - b. perubahan yang pengaruhnya besar seperti proses industrialisasi pada masyarakat agraris.
3. Perubahan yang dikehendaki dan perubahan yang tidak diinginkan
 - a. perubahan yang dikehendaki adalah bila seseorang mendapat kepercayaan sebagai pemimpin.
 - b. perubahan sosial yang tidak dikehendaki merupakan perubahan yang terjadi tanpa dikehendaki serta berlangsung dari jangkauan pengawasan masyarakat dan dapat menyebabkan timbulnya akibat yang tidak dingini.

C. Teori Perubahan Sosial

Teori perubahan sosial pada dasarnya dapat dikelompokkan dalam dua kelompok, yaitu teori klasik dan teori modern.

a. Teori Klasik Perubahan Sosial

Pemikiran para tokoh klasik tentang perubahan sosial dapat digolongkan ke dalam beberapa pola, perubahan sosial pola linear, perubahan sosial pola siklus, dan perubahan sosial gabungan beberapa pola.

1. Pola Linear

Perubahan sosial mengikuti pola linear seperti dikemukakan oleh Auguste Comte. Dia mengatakan bahwa kemajuan progresif peradaban manusia mengikuti suatu jalan yang alami, pasti, sama, dan tak terelakkan. Perubahan selalu berubah dari yang sederhana ke arah yang lebih kompleks, selalu berubah menuju ke arah kemajuan. Comte mengemukakan “hukum tiga tahap”, yaitu bahwa suatu masyarakat mengikuti perkembangan perubahan dengan pola seperti berikut :

a. *Tahap Teologis dan Militer*, yaitu suatu tahapan dimana hubungan sosial bersifat militer, masyarakat senantiasa bertujuan untuk menundukkan masyarakat lain. Pemikiran-pemikiran masyarakat dalam tahap ini ditandai oleh kuatnya pemikiran yang bersifat adikodrati, yaitu dikuasai oleh suatu kekuatan yang berasal dari luar diri manusia, kuatnya pemikiran magis regius, pemikiran yang bersifat rasional dan berdasar pada penelitian tidak dibenarkan.

b. *Tahap Metafisik dan Religius* , yaitu suatu tahapan dimana dalam masyarakat sudah terjadi adanya suatu hubungan atau jembatan pemikiran yang menghubungkan masyarakat militer dan masyarakat industri. Pengamatan atau penelitian masih dikuasai oleh imajinasi tetapi lambat laun semakin merubahnya dan menjadi dasar bagi suatu penelitian.

c. *Tahap Ilmu Pengetahuan dan Industri*, yaitu suatu tahapan dimana industri mendominasi hubungan sosial dan produksi menjadi tujuan utama masyarakat.

2. Pola Siklus

Menurut pola siklus, masyarakat berkembang laksana sebuah roda. Pada suatu saat ada di atas, saat lain ada di bawah. Masyarakat mengalami kemajuan dalam peradabannya, namun suatu saat akan mengalami kemunduran bahkan mungkin mengalami suatu kemusnahan. Perjalanan peradaban manusia laksana sebuah perjalanan gelombang , bisa muncul tiba-tiba, berkembang, kemudian lenyap. Bisa juga diibaratkan seperti

perkembangan seorang manusia mengalami masa muda, masa dewasa, masa tua dan kemudian punah.

3. Gabungan Beberapa Pola

Teori ini menggabungkan pola linear dan pola siklus. Perubahan sosial dalam masyarakat bisa berbentuk pola siklus dan linear. Contoh perubahan linear, dicontohkan oleh pemikiran Marx, menurut Marx, masyarakat berubah dari masyarakat komunis tradisional ke arah komunis modern. Menurutnya perkembangan pesat kapitalisme akan memicu konflik antar buruh dengan kaum borjuis yang akan dimenangkan oleh kaum buruh kemudian akan membentuk masyarakat komunis. Pemikiran siklus Marx terlihat dari pandangannya bahwa sejarah manusia adalah sejarah perjuangan terus menerus antara kelas-kelas dalam masyarakat. Setelah satu kelas menguasai kelas lainnya siklus akan berulang lagi.

Max Weber, salah satu tokoh yang menggabungkan pola siklus dan linear dalam melihat perubahan sosial. Pandangan siklusnya terlihat dalam mengkaji jenis wewenang yang ada dalam masyarakat. Menurutnya, di dalam masyarakat terdapat tiga jenis wewenang, yaitu wewenang kharismatis, rasional-legal, dan tradisional. Wewenang yang ada dalam masyarakat akan beralih-alih: wewenang kharismatis akan mengalami rutinisasi sehingga berubah menjadi wewenang tradisional atau rasional legal, kemudian akan muncul wewenang kharismatis kembali, dan itu akan berulang lagi. Sedangkan pandangan linearnya terlihat dari cara memandang masyarakat, bahwa perubahan masyarakat akan menuju ke arah peningkatan yaitu masyarakat yang rasional (rasionalitas).

a. Teori – Teori Modern Perubahan Sosial

Pada umumnya para penganut teori modern perubahan sosial melihat perubahan sosial pada negara-negara berkembang berjalan secara linear (bergerak dari tradisional ke modernitas) dan evolusioner (berjalan lambat). Di lain pihak, ada pandangan penganut teori konflik, yaitu mereka yang melihat bahwa sebenarnya perubahan itu tidak membawa dampak kemajuan bagi negara-negara berkembang. Yang terjadi sebaliknya, negara-negara berkembang menjadi negara yang terbelakang dan menciptakan ketergantungan negara berkembang kepada negara-negara industri maju di Barat.

Berikut ini adalah beberapa pandangan teori modern perubahan sosial.

1. Teori Modernisasi

Teori ini berpandangan bahwa negara-negara terbelakang akan meniru seperti apa yang telah dilakukan oleh negara-negara industri maju. Dengan meniru negara-negara maju mereka akan menjadi negara berkembang melalui proses modernisasi.

Negara-negara terbelakang dipandang perlu untuk merubah keadaan tradisionalnya ke arah yang lebih modern dengan memperbaiki sejumlah kekurangannya. Sejumlah perbaikan itu menyangkut : menurunnya angka kematian dan kelahiran, menurunnya ukuran dan pengaruh keluarga, terbukanya sistem stratifikasi, perubahan sistem feodal ke birokrasi, menurunnya pengaruh agama, beralihnya sistem pendidikan dari keluarga dan komunitas ke sistem pendidikan formal, munculnya kebudayaan massa, dan munculnya perekonomian pasar dan industrialisasi. (Kamanto Sunarto dikutip dari Etzioni, 1973:177)

2. Teori Ketergantungan (Dependencia)

Teori ini berpandangan bahwa berdasarkan pengalaman kepada negara-negara Amerika Latin telah terjadi perkembangan dunia yang tidak merata. Di satu pihak negara – negara maju mengalami perkembangan, di lain pihak secara bersamaan negara-negara dunia ketiga mengalami kolonialisme dan neo-kolonialisme bahkan justru menjadi semakin terbelakang, dunia ketiga tidak mengalami tahap “tinggal landas”. Keadaan ini menciptakan negara dunia ketiga yang ekonominya berbasis kepada sumber daya alam selalu tergantung pada negara industri maju .

3. Toeri Sistem Dunia

Toeri ini berpandangan, seperti dicetuskan oleh pendirinya Immanuel Wallerstein, bahwa perekonomian kapitalis dunia terbagi atas tiga jenjang, yaitu: negara-negara inti, negara-negara semi periferi, dan negara-negara periferi.

Negera-negara inti adalah adalah negara-negara industri di Eropa Barat yang telah mengalami industrialisasi sejak abad ke-16 dan sekarang telah berkembang pesat. Negara-negara semi periferi adalah negara-negara di Eropa Selatan yang secara ekonomi berhubungan dengan inti namun tidak berkembang. Sedangkan negara-negara periferi adalah negara-negara Asia dan Afrika.

Pada saat ini, negara-negara inti (termasuk Amerika Serikat dan Jepang) menguasai sistem dunia sehingga mampu menguasai sumber daya alam negara lain untuk kepentingan mereka sendiri. Sedangkan negara-negara semi dan periferi sudah tidak mungkin lagi mengejar ketertinggalan yang semakin jauh dengan negara-negara inti.

D. Penyebab Perubahan Sosial

Interelasi dan interaksi sosial masyarakat mendorong perkembangan berpikir dan reaksi emosional para anggotanya. Hal ini mendorong masyarakat untuk mengadakan berbagai perubahan. Perkembangan kualitas dan kuantitas anggota masyarakat juga mendorong perubahan sosial

Prof.Dr.Soerjono Soekanto menyebutkan adanya factor intern dan ekstern yang menyebabkan perubahan sosial dalam masyarakat, yaitu:

1. Faktor intern

a. Bertambahnya dan berkurangnya penduduk

Bertambah dan berkurangnya penduduk yang sangat cepat di pulau Jawa menyebabkan terjadinya perubahan dalam struktur masyarakat. Berkurangnya penduduk mungkin dapat disebabkan karena perpindahan penduduk dari desa ke kota, atau dari satu daerah ke daerah lain, misalnya transmigrasi.

b. Adanya penemuan-penemuan baru yang meliputi berbagai proses, seperti di bawah ini:

- Discovery, penemuan unsure kebudayaan baru
- Invention, pengembangan dari discovery
- Inovasi, proses pembaharuan

c. Konflik dalam masyarakat

Konflik (pertentangan) yang dimaksud adalah konflik antara individu dalam masyarakatnya, antar kelompok dan lain-lain.

d. Pemberontakan dalam tubuh masyarakat.

Revolusi Indonesia 17 Agustus 1945 mengubah struktur pemerintahan kolonial menjadi pemerintah nasional dan berbagai perubahan struktur yang mengikutinya.

2. Faktor Ekstern

a. Faktor alam yang ada disekitar masyarakat yang berubah, seperti bencana alam.

b. Pengaruh kebudayaan lain dengan melalui adanya kontak kebudayaan antara dua masyarakat atau lebih yang memiliki kebudayaan yang berbeda. Akulturasi dan asimilasi kebudayaan berperan dalam perubahan ini.

LATIHAN

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan perubahan sosial ?
2. Perubahan sosial mencakup perubahan dalam bidang apa saja. Jelaskan !
3. Bagaimana pandangan tokoh-tokoh klasik tentang perubahan sosial ?

4. Jelaskan bagaimana pandangan tokoh modern tentang perubahan sosial !
5. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial? Jelaskan!
6. Kemajuan dalam dunia teknologi dan informasi telah menimbulkan perubahan yang sangat besar dalam masyarakat kita. Contohnya tayangan televisi menimbulkan perubahan dalam pola kegiatan manusia sesuai dengan jam tayang. Perubahan komunikasi dan interaksi manusia akibat *mobile phone* dan banyak lagi kasus lainnya. Jelaskan dan analisis oleh anda perubahan social yang diakibatkan oleh kemajuan dalam bidang teknologi informasi !

RANGKUMAN

Perubahan sosial sebagai perubahan yang terjadi dalam fungsi dan struktur masyarakat. Perubahan-perubahan sosial dikatakannya sebagai perubahan dalam hubungan sosial (*social relationship*) atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan (*equilibrium*) hubungan sosial tersebut. Setiap perubahan yang terjadi dalam struktur masyarakat atau perubahan dalam organisasi sosial disebut perubahan sosial. Perubahan sosial berbeda dengan perubahan kebudayaan. Perubahan kebudayaan mengarah pada perubahan unsur-unsur kebudayaan yang ada.

Perubahan social mencakup tiga hal, yaitu :

- a. Perubahan dalam struktur social
- b. Perubahan organisasi social
- c. Perubahan hubungan social.

Perubahan sosial bisa terjadi dengan cara :

- a. . Direncanakan (*planned*) atau /dan tidak direncanakan (*unplanned*).
- b. . Menuju kearah kemajuan (*progressive*) atau/ dan kemunduran (*regressive*).
- c. Bersifat positif atau negative.

Teori perubahan sosial pada dasarnya dapat dikelompokkan dalam dua kelompok, yaitu teori klasik dan teori modern perubahan sosial . Teori klasik tentang perubahan sosial dapat digolongkan ke dalam beberapa pola, perubahan sosial pola linear, perubahan sosial pola siklus, dan perubahan sosial gabungan beberapa pola. Teori modern perubahan sosial melihat perubahan sosial pada negara-negara berkembang berjalan secara linear (bergerak dari tradisional ke modernitas) dan evolusioner (berjalan lambat). Di lain pihak, ada pandangan penganut teori konflik, yaitu mereka yang melihat bahwa sebenarnya perubahan itu tidak membawa dampak kemajuan bagi negara-negara berkembang.

Perubahan sosial disebabkan oleh adanya factor intern dan ekstern dalam masyarakat. Factor intern perubahan sosial dalam masyarakat, yaitu: bertambahnya dan berkurangnya penduduk, adanya penemuan-penemuan baru yang meliputi berbagai proses, seperti discovery, invention, dan inovasi. Selain itu disebabkan oleh adanya konflik (pertentangan), dan pemberontakan dalam masyarakatnya. Faktor Ekstern seperti bencana alam serta akulturasi dan asimilasi kebudayaan .

2. Pembangunan dan Modernisasi

A. Pendahuluan

Konsep pembangunan dan modernisasi seringkali bertukar tempat. Bahkan dalam beberapa hal kedua konsep ini memiliki kesamaan ciri. Secara konsep kedua istilah ini memang bisa dibedakan, namun dalam praktek dan proses keduanya bias berjalan secara tumpang tindih. Sebuah masyarakat yang sedang mengalami pembangunan sekaligus juga di dalamnya sedang mengalami proses modernisasi, hal ini sesuai dengan teori perubahan social yang bersifat linear. Sebuah masyarakat modern adalah masyarakat yang memiliki ciri-ciri modern. Ada sejumlah ciri suatu masyarakat dikatakan modern. Modernisasi adalah suatu proses dari suatu tahapan perubahan sosial , dimana masyarakat harus hidup menyesuaikan diri dengan konstelasi tuntutan lingkungan yang ada. Tuntutan hidup dengan lingkungan kekinian menuntut masyarakat mampu mengikuti kondisi yang ada dan memiliki kebudayaan dalam konteks globalisasi. Oleh karena itu dalam pokok bahasan di bawah ini akan diapaparkan masala-masalah konsep pembangunan dan modernisasi, faktor-faktor budaya yang menghambat pembangunan, kebudayaan global dan globalisasi.

B. Konsep Pembangunan dan Modernisasi

Perubahan sosial yang direncanakan seringkali disebut dengan pembangunan. Konsep pembangunan mengandung makna sebuah perubahan positif yang direncanakan, terarah, dan dilakukan dengan sadar/disengaja. Konsep pembangunan dalam beberapa hal seringkali kali saling bersamaan dengan konsep modernisasi. Karena itu seringkali orang menggunakan kata pembangunan yang di dalamnya terdapat unsur-unsur modernisasi. Begitu pula kata modernisasi sering digunakan tumpang tindih dengan kata pembangunan.

Modernisasi dimulai di Italia abad ke-15 dan tersebar ke sebagian besar ke dunia Barat dalam lima abad berikutnya. Kini gejala modernisasi telah mejalar pengaruhnya ke

seluruh dunia. Manifesto proses modernisasi pertama kali terlihat di Inggris dengan meletusnya revolusi industri pada abad 18, yang merubah cara produksi tradisional ke modern.

Modernisasi masyarakat adalah suatu proses transformasi yang merubah:

- Dibidang ekonomi, modernisasi berarti tumbuhnya kompleks industri yang besar, dimana produksi barang konsumsi dan sarana dibuat secara massal.
- Dibidang politik, dikatakan bahwa ekonomi yang modern memerlukan ada masyarakat nasional dengan integrasi yang baik.

Modernisasi menimbulkan perubahan dalam kehidupan. Oleh karena itu, modernisasi sangat diharapkan berlangsungnya oleh masyarakat. Bahkan bagi pemerintah merupakan suatu proses yang sedang diusahakan secara terarah. Modernisasi menurut Cyril Edwin Black yaitu rangkaian perubahan cara hidup manusia yang kompleks dan saling berhubungan, merupakan bagian pengalaman yang universal dan yang dalam banyak kesempatan merupakan harapan bagi kesejahteraan manusia.

Menurut Koentjaraningrat, modernisasi merupakan usaha penyesuaian hidup dengan konstelasi dunia sekarang ini. Hal itu berarti bahwa untuk mencapai tingkat modern harus berpedoman kepada dunia sekitar yang mengalami kemajuan. Modernisasi yang telah dilandasi oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak hanya bersifat fisik material saja, melainkan lebih jauh daripada itu, yaitu dengan dilandasi oleh sikap mental yang mendalam.

Manusia yang telah mengalami modernisasi, terungkap pada sikap mentalnya yang maju, berpikir rasional, berjiwa wiraswasta, berorientasi ke masa depan, dan seterusnya.

Menurut Schorrl (1980), modernisasi adalah proses penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi kedalam semua segi kehidupan manusia dengan tingkat yang berbeda-beda tetapi tujuan utamanya untuk mencari taraf hidup yang lebih baik dan nyaman dalam arti yang seluas-luasnya, sepanjang masih dapat diterima oleh masyarakat yang bersangkutan.

Smith (1973), modernisasi adalah proses yang dilandasi dengan seperangkat rencana dan kebijaksanaan yang disadari untuk mengubah masyarakat kearah kehidupan masyarakat yang kontemporer yang menurut penilaian lebih maju dalam derajat kehormatan tertentu.

1. Syarat-Syarat Modernisasi

Modernisasi dapat terwujud melalui beberapa syarat, yaitu:

- Cara berpikir ilmiah yang *institutionalized* baik kelas penguasa maupun masyarakat.
- Sistem administrasi Negara yang baik yang benar-benar mewujudkan birokrasi

- Adanya sistem pengumpulan data yang baik dan teratur yang terpusat pada suatu atau lembaga tertentu.
- Penciptaan iklim yang baik dan teratur dari masyarakat terhadap modernisasi dengan cara penggunaan alat komunikasi massa. Hal ini harus dilakukan tahap demi tahap, karena banyak sangkut pautnya dengan sistem kepercayaan.
- Tingkat organisasi yang tinggi, yaitu adanya pembagian kerja, efisiensi dan efektifitas kerja.
- Adanya keseimbangan antara sentralisasi dan desentralisasi.

2. Ciri-ciri Modernisasi

Modern merupakan salah satu modal kehidupan yang ditandai dengan ciri-ciri modern :

- Naturitas kebutuhan material dan ajang persaingan kebutuhan manusia
- Kemajuan teknologi dan industrialisasi, individualisasi, sekularisasi, diferensiasi, dan akulturasi.
- Modern banyak memberikan kemudahan bagi manusia
- Berkat jasanya, hampir semua keinginan manusia terpenuhi.
- Modernisasi juga memberikan melahirkan teori baru.
- Mekanisme masyarakat berubah menuju prinsip dan logika ekonomi serta orientasi kebendaan yang berlebihan
- Kehidupan seorang perhatian religiusnya dicurahkan untuk bekerja dan menumpuk kekayaan.

C. Faktor – Faktor Budaya yang Menghambat Pembangunan

Proses pembangunan tidak selalu berjalan mulus, karena dihadapkan beberapa permasalahan, salah satunya permasalahan mentalitas atau budaya. Ada budaya - budaya yang menghambat proses pembangunan itu sendiri.

Salah satu contoh hambatan budaya itu seperti keterkaitan orang Jawa terhadap tanah yang mereka tempati. Tanah secara turun temurun diyakini sebagai pemberi berkah kehidupan. Mereka enggan meninggalkan kampung halamannya atau beralih pola hidup sebagai petani. Padahal hidup mereka umumnya miskin.

Hambatan budaya yang berkaitan dengan perbedaan persepsi atau sudut pandang, misalnya pada awal program Keluarga Berencana terjadi penolakan oleh sebagian masyarakat. Mereka beranggapan bahwa banyak anak adalah banyak rezeki.

Hambatan budaya yang berkaitan dengan faktor psikologis, seperti upaya untuk mentransmigrasikan penduduk dari daerah yang terkena bencana alam banyak mengalami kesulitan. Hal ini disebabkan karena adanya kekhawatiran penduduk bahwa di tempat yang baru, hidup mereka akan lebih sengsara dibandingkan dengan hidup mereka di tempat yang lama.

Masyarakat daerah-daerah terpencil yang kurang komunikasi dengan masyarakat luar, karena pengetahuannya serba terbatas seolah-olah tertutup untuk menerima program-program pembangunan.

Sikap tradisionisme yang berprasangka buruk terhadap hal-hal baru. Sikap ini sangat mengagungkan budaya tradisional sedemikian rupa, yang menganggap hal-hal baru itu akan merusak tatanan hidup mereka yang sudah mereka miliki secara turun-temurun.

Sikap Etnosentrisme yaitu sikap yang mengagungkan budaya suku bangsanya sendiri dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain. Sikap semacam ini akan mudah memicu timbulnya kasus-kasus sara, yakni suku, agama, ras, dan antar golongan. Sikap seperti ini akan menghambat terciptanya integrasi nasional.

D. Kebudayaan Global dan Globalisasi

Secara sepintas kita dapat membayangkan bahwa yang dimaksud dengan kebudayaan global adalah suatu kebudayaan yang tidak dimiliki oleh banyak bangsa (kelompok sosial) tapi juga merupakan kebudayaan yang dimiliki oleh banyak bangsa di dunia. Menurut Selo Sumarjan, globalisasi adalah suatu proses terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia, yang bertujuan untuk mengikuti sistem dan kaidah-kaidah tertentu yang sama, contohnya : PBB, OKI, ASEAN, beserta hukum-hukum internasional seperti HAM yang tertuang dalam piagam PBB.

1. Faktor-faktor nilai budaya luar yang mempercepat proses globalisasi :

- a. Rasionalisasi
- b. Efisiensi dan produktivitas
- c. Keberanian bersaing, bertanggung jawab, dan menanggung resiko
- d. Senantiasa meningkatkan pengetahuan
- e. Patuh pada hukum
- f. Kemandirian
- g. Kemampuan melihat kedepan
- h. Keterbukaan
- i. Etos kerja

2. Saluran proses globalisasi :

- a. Lembaga-lembaga internasional yang mengatur peraturan-peraturan internasional
- b. Lembaga-lembaga kenegaraan, baik dalam hubungan diplomatik secara bilateral maupun regional
- c. Lembaga-lembaga pendidikan dan ilmu pengetahuan
- d. Lembaga-lembaga keagamaan
- e. Lembaga-lembaga perniagaan dan industri internasional
- f. Saluran-saluran komunikasi dan telekomunikasi internasional
- g. Wisata mancanegara

3. Respon masyarakat terhadap globalisasi

Globalisasi akan menimbulkan gejala perubahan terhadap kelompok sosial yang bersangkutan. Pada setiap gejala perubahan akan menimbulkan konflik atau perbedaan sudut pandang yang terjadi antar kelompok sosial yang menerima dan yang menolak arus globalisasi tersebut.

Dampak globalisasi terhadap budaya Indonesia :

a. Dampak positif globalisasi

1. Dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui sarana telekomunikasi seperti radio, televisi, film, dan sarana elektronik lainnya.
2. Dibidang sumber daya manusia, globalisasi menumbuhkan kinerja yang berwawasan luas dan beretos kerja tinggi.
3. Dibidang sosial budaya, globalisasi dapat menumbuhkan dinamika yang terbuka dan tanggap terhadap unsur-unsur pembaharuan.

b. Dampak negatif globalisasi

1. Guncangan budaya (culture shock)

Menurut Soeryono Soekanto, guncangan budaya terjadi apabila warga masyarakat mengalami disorientasi dan frustrasi. Hal ini berlangsung apabila ada anggota masyarakat yang tidak siap menerima kenyataan perubahan-perubahan akibat globalisasi.

2. Ketimpangan budaya (culture lag)

Ketimpangan budaya adalah suatu kenyataan bahwa masuknya unsur-unsur globalisasi tidak terjadi secara serempak. Unsur-unsur yang terkait dengan teknologi masuk sedemikian cepatnya, sedangkan unsur-unsur sosial budaya, katakanlah di

bidang pendidikan sedemikian lambat. Di pihak lain ada sekelompok masyarakat yang begitu cepat menyerap dan menerima unsure-unsur globalisasi. Akan tetapi, ada juga sekelompok masyarakat yang begitu tertinggal untuk menerima unsur-unsur globalisasi tersebut. Akibat situasi tersebut, perubahan unsur-unsur sosial budaya yang terjadi dalam masyarakatnya juga tidak terjadi secara serempak. Ketidakerempakan inilah yang kita kenal dengan ketimpangan budaya (*culture lag*)

3. Pergeseran nilai-nilai budaya yang menimbulkan anomie

Masuknya unsur-unsur globalisasi yang gencar dalam waktu yang relatif singkat akan mengakibatkan terjadinya berbagai perubahan sosial budaya secara menyusul. Itu, sistem nilai dan norma yang ada dalam kehidupan masyarakat yang tidak siap mengantisipasi terjadinya perubahan-perubahan itu. Akibatnya, masyarakat menjadi kebingungan (*anomie*). Nilai dan norma sosial budaya mana yang paling cocok untuk mengantisipasi arus globalisasi yang sedang berlangsung.

Diantara kelompok masyarakat yang paling kebingungan adalah kelompok remaja yang secara sosial belum memiliki identitas yang mantap. Kelompok masyarakat lainnya adalah mereka yang secara tiba-tiba “ketiban rezeki nomplok” menjadi orang kaya baru, karena berbagai “keberuntungan”

Contoh akibat adanya anomie, yaitu :

1. Pergaulan bebas, kenakalan remaja, dan penyalahgunaan narkotik yang melanda para remaja.
2. “aji mumpung” dan “konsumerisme” di kalangan orang kaya baru.

Dapat dikatakan bahwa kehidupan manusia pada abad 21 tidak akan terlepas dari teknologi canggih, seperti : internet, yang sejak diluncurkan telah menjadi *big bang* disetiap wilayah di seluruh dunia. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa globalisasi tidak dapat dihindari lagi, karena telah menjadi bagian yang penting bagi sebagian kelompok orang. Melalui internet pencampuran kebudayaan sangat mudah terjadi, namun sebagian dari suatu kelompok sosial, kita harus dapat menentukan bagian mana yang harus diadopsi, dan bagian mana dari kebudayaan itu yang harus kita hindari. Karena globalisasi dapat membawa efek positif atau efek negatif tergantung dari bagaimana kita berhadapan dengan kebudayaan tersebut.

LATIHAN

1. Jelaskan pengertian pembangunan dan modernisasi !

2. Mengapa pembangunan di negara kita tidak selalu berjalan mulus bila dikaitkan dengan masalah budaya/mentalitas bangsa ?
3. Apa saja ciri- ciri manusia modern itu ?
4. Apa yang dimaksud dengan globalisasi ?
5. Indonesia dihadapkan pada persaingan menghadapi perdagangan pasar bebas. Jelaskan keuntungan dan kerugian dari masalah tersebut ! Mengapa ?
6. Apakah globalisasi bermamfaat bagi bangsa kita ? Jelaskan !

RANGKUMAN

Pembangunan mengandung makna sebuah perubahan sosial secara positif yang direncanakan, terarah, dan dilakukan dengan sadar/disengaja. Modernisasi merupakan usaha penyesuaian hidup dengan konstelasi dunia sekarang ini. Menurut Schorrl (1980), modernisasi adalah proses penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi kedalam semua segi kehidupan manusia dengan tingkat yang berbeda-beda tetapi tujuan utamanya untuk mencari taraf hidup yang lebih baik dan nyaman dalam arti yang seluas-luasnya, sepanjang masih dapat diterima oleh masyarakat yang bersangkutan.

Modernisasi dapat terwujud melalui beberapa syarat, yaitu: Cara berpikir ilmiah yang institusionalized, sistem administrasi negara yang baik yang benar-benar mewujudkan birokrasi, sistem pengumpulan data yang baik dan teratur, cara penggunaan alat komunikasi massa yang baik dan teratur, tingkat organisasi yang tinggi, disiplin yang tinggi, dan adanya sentralisasi wewenang.

Modernisasi ditandai dengan ciri-ciri modern : naturitas kebutuhan dan persaingan , kemajuan teknologi dan industrialisasi, individualisasi, sekularisasi, diferensiasi, dan akulturasi, adanya kemudahan bagi manusia, majunya bidang jasanya, lahirnya teori baru , bertambahnya prinsip dan logika ekonomi, dan perhatian religius dicurahkan untuk bekerja dan menumpuk kekayaan.

Pembangunan tidak selalu berjalan mulus, karena dihadapkan bebarapa permasalahan, salah satunya permasalahan mentalitas atau budaya. Ada budaya - budaya yang menghambat proses pembangunan baik yang bersifat psikologis, persepsi yang keliru , tradisi , dan sikap mental yang tidak mendukung.

Kebudayaan global adalah suatu kebudayaan yang tidak dimiliki oleh banyak bangsa (kelompok sosial) tapi juga merupakan kebudayaan yang dimiliki oleh banyak bangsa di dunia. Sedangkan globalisasi adalah suatu proses terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia.

Dampak globalisasi terhadap budaya Indonesia :

Globalisasi dapat berdampak positif dan negatif. Dampak positif globalisasi seperti peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi, tumbuhnya kinerja yang berwawasan luas dan beretos kerja tinggi, menumbuhkan dinamika yang terbuka dan tanggap terhadap unsur-unsur pembaharuan. Sedangkan dampak negatif globalisasi dapat berupa guncangan budaya (*culture shock*), dan ketimpangan budaya (*culture lag*).

3 . Permasalahan –Permasalahan Dalam Pembangunan Kependudukan, Kependidikan, dan Ketenagakerjaan

A. Pendahuluan

Suatu proses perubahan yang ditujukan kearah yang positif serta direncanakan disebut dengan pembangunan. Pembangunan meliputi banyak dimensi, salah satunya pembangunan dalam dimensi kependudukan, kependidikan, dan ketenagakerjaan. Pembangunan dalam dimensi kependudukan, kependidikan, dan ketenagakerjaan adalah dimensi-dimensi pembangunan yang secara langsung berhubungan dengan pembangunan sumber daya manusia (SDM). Ada banyak persoalan yang dihadapi dalam bidang kependudukan, kependidikan, dan ketenagakerjaan. Masalah-masalah yang dihadapi dalam bidang kependudukan diantaranya, masalah kepadatan penduduk, tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi, jumlah penduduk yang tinggi, kesenjangan penduduk dalam rasio jenis kelamin dan usia. Dalam bidang kependidikan, pembangunan pendidikan yang tadinya diharapkan sebagai sarana reproduksi sosial, ternyata membawa masalah, sistem pendidikan tetap menjadi sarana dalam mempertahankan kesenjangan sosial yang ada. Begitu juga dalam bidang ketenagakerjaan, masalah-masalah seperti pengangguran, masalah pengiriman TKI ke luar negeri, masalah hubungan industrial, dan masalah peraturan ketenagakerjaan tetap menjadi masalah dominant dalam ketenagakerjaan di Negara kita. Masalah-masalah tersebut di atas yang diangkat dalam pembahasan di bawah ini.

B. Pembangunan Dalam Bidang Kependudukan

Persebaran penduduk Indonesia belum merata di semua propinsi di Indonesia. Sebagian besar penduduk masih berada di Pulau Jawa. Dari sensus penduduk 1990 diketahui bahwa 60% penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa yang luasnya hanya sekitar 7% dari seluruh wilayah daratan Indonesia. Sedangkan Kalimantan yang memiliki luas 28% luas total hanya berpenghuni sekitar 5% penduduk. Ketimpangan ini menyebabkan ketimpangan dalam kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk di Pulau Jawa mencapai 814 orang per kilometer, sedangkan di Maluku dan Irian Jaya hanya tujuh orang. Pada tahun 1990, secara keseluruhan penduduk wanita sedikit lebih banyak dari penduduk laki-laki masih lebih besar dibanding dengan jumlah penduduk wanitanya.

Penyebaran penduduk pada tahun 1990 berdasarkan tempat lahir dan tempat tinggal sekarang menunjukkan bahwa 14,8 juta penduduk Indonesia pernah pindah semasa hidupnya, dimana sebagian besar dari jumlah tersebut lahir di Pulau Jawa. Demikian pula untuk migran berdasarkan tempat tinggal terakhir dan tempat tinggal sekarang maka terdapat 17,8 juta yang pernah pindah. Sebagian dari perpindahan penduduk dibiayai oleh pemerintah (transmigrasi umum). Riau merupakan daerah tujuan transmigrasi yang paling banyak diminati (sejak 1988 s/d 1992). Pada tahun 1992/1993 terjadi penurunan jumlah transmigrasi umum untuk sebagian besar daerah yang dituju, dan bahkan tidak ada yang bertransmigrasi ke Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Timur. Rata-rata warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Benua Asia. Benua Afrika merupakan benua yang paling sedikit jumlah warga negara Indonesiannya. Total jumlah warga negara Indonesia yang berada di luar negeri sebanyak 261.416 orang pada tahun 1992.

Selain komposisi penduduk menurut propinsi, Biro Pusat Statistik juga menyajikan komposisi penduduk dilihat dari segi tempat tinggal menurut pulau. Demikian pula halnya Lembaga Demografi UI, juga seringkali menampilkan data yang memperkaya apa yang disajikan BPS. Berikut ditampilkan data penduduk Indonesia menurut Propinsi dan Pulau tahun 1990 dan tahun 1995 dan pertumbuhan penduduk Indonesia menurut propinsi dan pulau, serta kecenderungan tahun 2000 dan tahun 2005.

PERTUMBUHAN PENDUDUK INDONESIA MENURUT PROPINSI DAN PULAU 1990-2005

Propinsi dan Pulau	PROYEKSI LEMBAGA DEMOGRAFI			
	1990	1995	2000	2005
1. DI Aceh	3.415.324	3.813.004	4.212.674	4.596.768
2. Sumatra Utara	10.226.068	11.167.277	11.970.847	12.646.774
3. Sumatra Barat	4.022.586	4.384.171	4.738.503	5.057.124
4. Riau	3.309.696	4.181.449	5.135.953	6.143.301
5. Jambi	2.019.411	2.271.424	2.518.341	2.751.169
6. Sumatra Selatan	6.347.292	7.414.685	8.561.569	9.759.486
7. Bengkulu	1.178.809	1.410.809	1.661.746	1.924.522
8. Lampung	7.449.781	9.264.525	11.403.468	1.381.059
	38.008.967	43.907.344	50.203.101	56.695.203
SUMATRA				
	8.853.748	9.741.717	10.543.552	11.255.905
9. DKI	35.375.640	39.435.270	43.432.720	47.324.780
10. Jawa Barat	28.521.370	29.471.610	30.043.170	30.337.900
11. Jawa Tengah	3.119.221	3.282.614	3.424.511	3.537.108
12. DI Yogyakarta	32.502.010	34.282.610	35.651.420	36.765.440
13. Jawa Timur	108.371.989	116.144.711	123.095.373	129.221.113
JAWA				
	2.783.292	2.987.327	3.186.904	3.375.477
	3.369.158	3.762.063	4.211.450	4.680.804
	3.267.637	3.287.166	3.305.842	3.318.308
14. Bali	9.420.085	10.036.556	10.404.196	11.374.589
15. Nusa Tenggara Brt				
16. Nusa Tenggara Tmr				
BALI & NUSA TENGGARA				
	3.237.919	3.593.701	3.947.156	4.285.865
	1.400.280	1.722.911	2.100.555	2.534.381
	2.599.237	2.909.677	3.208.173	3.485.220
17. Kalimantan Barat	1.883.644	2.292.783	2.741.295	3.235.445
18. Kalimantan Tengah	9.121.080	10.509.702	11.997.179	13.540.911
19. Kalimantan Selatan				
20. Kalimantan Timur				
KALIMANTAN				
	2.491.424	2.635.262	2.782.557	2.916.843
	1.702.548	1.921.766	2.138.679	2.340.995
	6.981.480	7.510.669	7.964.969	8.353.514
21. Sulawesi Utara	1.349.236	1.546.253	1.759.890	1.980.185
22. Sulawesi Tengah	12.524.688	13.616.950	14.646.095	15.591.537
23. Sulawesi Selatan				
24. Sulawesi Tenggara				
SULAWESI				
	1.850.884	2.056.192	2.254.322	2.442.947
	1.628.724	1.857.043	2.082.419	2.305.522
	3.913.235	3.913.235	4.336.741	4.748.469
25. Maluku				
26. Irian Jaya				
MALUKU DAN IRIAN JAYA				
INDONESIA	180.926.417	198.137.867	214.982.686	231.171.842

Tabel di atas menggambarkan bahwa penduduk Indonesia secara absout jumlahnya terus bertambah. Penduduk Indonesia tahun 1980 berjumlah 147,5 juta, dan mengalami kenaikan menjadi 179,3 juta berdasarkan sensus tahun 1990. Selanjutnya tahun 2005

diperkirakan akan meningkat lagi menjadi 230 juta lebih. Sebaliknya dengan angka absolut, maka angka pertumbuhan terus menurun, yaitu dari 2,37 % per tahun dalam periode 2000-2005.

**PENDUDUK INDONESIA MENURUT PEDESAAN DAN PERKOTAAN
1990 - 2020**

Tahun	Jumlah Penduduk			Angka Urbanisasi
	Total	Urban	Rural	
1990	180.383.700	51.932.467	128.451.233	28,79
1995	195.755.600	63.679.297	132.076.303	32,53
2000	210.263.800	76.662.181	133.601.619	36,46
2005	223.183.300	90.344.600	132.838.700	40,48
2010	235.110.800	104.577.284	130.533.516	44,48
2015	245.388.200	118.792.228	126.595.772	48,41
2020	253.667.600	132.465.221	121.202.379	52,22

Tabel di atas menunjukkan secara absolut, jumlah penduduk pedesaan akan mencapai 133,6 juta, dan kondisi ini merupakan puncak pertumbuhan. Setelah itu, jumlah penduduk pedesaan akan berkurang. Sementara jumlah penduduk perkotaan pada tahun 2020 paling sedikit akan berjumlah 2,5 kali jumlah penduduk perkotaan tahun 1990.

Berkaitan dengan persebaran penduduk, suatu permasalahan yang dipandang perlu adalah pemerataan persebaran penduduk. Didasari pada keinginan setiap individu untuk melakukan mobilitas termasuk bermigrasi dengan suatu tujuan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Atas dasar itu maka perbedaan aktivitas ekonomi dan perbedaan peluang untuk memperoleh pendapatan dan kesempatan kerja merupakan sebab utama ketimbang persebaran penduduk di Indonesia, khususnya antara pulau Jawa dan luar Jawa.

Persebaran Penduduk . Salah satu masalah kependudukan di Indonesia adalah persebaran penduduk yang tidak merata. Hal ini berkaitan dengan daya dukung lingkungan (luas wilayah) yang tidak seimbang antara Jawa-Bali. Pulau Jawa yang luas wilayahnya kurang dari 7 persen dihuni oleh 58,7 persen penduduk, sehingga kepadatan penduduk di Pulau Jawa mencapai 880 jiwa per Km² pada tahun 1996.

Kepadatan penduduk di luar Pulau Jawa, jauh lebih rendah, yaitu baru didiami oleh kurang dari 100 Jiwa setiap Km² di Pulau Sumatera dan Sulawesi, dan kurang dari 20 jiwa setiap Km² di Kalimantan serta khususnya di Irian Jaya yang baru dihuni oleh 5 Jiwa setiap Km². Gambaran ini selain memberikan petunjuk tentang tidak meratanya persebaran penduduk, juga menunjukkan kurang seimbangannya proporsi luas wilayah.

Bila kepadatan penduduk setiap propinsi dibandingkan, maka luas wilayah di propinsi-propinsi Jawa dan Bali sudah tidak memadai, apalagi DKI Jakarta yang didiami oleh lebih dari 15.732 jiwa per Km².

Persentase Penduduk Kota Sejak tahun 1971 penduduk perkotaan terus meningkat dengan pesat, yaitu dari 17,3 persen pada tahun 1971 menjadi 22,4 persen pada tahun 1980 dan meningkat menjadi 37,1 persen pada tahun 1996. Hal ini disebabkan proses urbanisasi yang terus menerus terjadi karena kehidupan dipertanian dianggap lebih baik dan menjanjikan mudah memperoleh kesempatan kerja dan berusaha daripada di pedesaan sehingga dapat disebutkan pula bahwa meningkatnya penduduk kota tersebut antara lain disebabkan oleh pengaruh keadaan sosial dan pertumbuhan pembangunan secara nasional.

Rasio jenis Kelamin. Perkembangan penduduk menurut jenis kelamin dapat dilihat dari perkembangan rasio jenis kelamin, yaitu perbandingan penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan.

Rasio jenis kelamin penduduk selama tiga periode sensus berada dibawah angka 100 yaitu 97,2 pada tahun 1971, 98,8 pada tahun 1980 dan 99,4 pada tahun 1995 dan tahun 1996 menjadi 99,07.

Pada penduduk kelompok umur 0-14 tahun perkembangan rasio jenis kelamin cenderung tetap diatas 100 yang berarti anak laki-laki lebih banyak dibandingkan anak perempuan sedangkan pada penduduk umur 15-64 (penduduk umur produktif) mengalami kenaikan walaupun masih dibawah 100 dan pada kelompok umur 65+ mengalami penurunan dari 94,16 pada tahun 1971 menjadi 86,80 pada tahun 1995.

Penduduk menurut golongan umur dan jenis kelamin. Rincian penduduk Indonesia menurut golongan umur (dalam persen) dan jenis kelamin tergambar dalam piramida penduduk hasil sensus tahun 1971, 1980 dan tahun 1990, menunjukkan ciri yang menarik antara lain :

Pertama, struktur umur penduduk Indonesia masih tergolong “muda”. Antara proporsi penduduk dibawah 15 tahun masih tinggi walaupun secara berangsur mulai menurun, yaitu dari 43,97% pada tahun 1971 menjadi 40,90% pada tahun 1980 dan 36,6% pada tahun 1990 kemudian turun menjadi 33,54% pada tahun 1995.

Kedua, Proporsi penduduk usia lanjut (65 tahun keatas) semakin bertambah yaitu 2,51 pada tahun 1971 menjadi 3,25% pada tahun 1980 dan 3,88% pada tahun 1990 menjadi 4,25% pada tahun 1995. Sedangkan proporsi anak dibawah lima tahun terlihat menurun yaitu 16,1% pada tahun 1971 menjadi 14,4% pada tahun 1980, menjadi 11,7% pada tahun 1990 dan menjadi 11,3% pada tahun 1994, pada tahun 1995 menjadi 11,1% dan menjadi 10,13 pada

tahun 1996. Ketiga, perbandingan laki-laki dan perempuan/sex ratio cenderung meningkat. Persentase penduduk menurut komposisi penduduk menurut umur terjadi perubahan komposisi, yaitu semakin kecilnya proporsi penduduk tidak produktif yaitu yang berumur muda (0-14 th) dan umur lanjut (65 th keatas). Hal ini berarti bahwa angka ketergantungan/angka beban tanggungan semakin kecil. Pada tahun 1971 tercatat sebesar 87 per 100 tahun turun menjadi 61 per 100 pada tahun 1995 dan pada tahun 1996 menjadi 57 per 100 berarti secara rata-rata tanggungan setiap 100 penduduk produktif telah berkurang dari 87 pada tahun 1971 menjadi 61 pada tahun 1995 dan pada tahun 1996 menjadi 57.

Usia kawin pertama. Usia wanita saat perkawinan pertama dapat mempengaruhi resiko melahirkan. Semakin muda usia saat perkawinan pertama semakin besar resiko yang dihadapi bagi keselamatan ibu maupun anak, karena disebabkan belum matangnya rahim wanita usia muda untuk memproduksi anak atau belum siap mental dalam berumah tangga. Demikian pula sebaliknya, semakin tua usia saat perkawinan pertama semakin tinggi resiko yang dihadapi dalam masa kehamilan atau melahirkan. Menurut hasil SUPAS tahun 1995 terdapat 21,5 persen wani di Indonesia yang perkawinan pertamanya dilakukan ketika mereka berumur kurang dari 17 tahun. Di daerah pedesaan dan perkotaan wanita yang melakukan perkawinan dibawah umur tercatat sebesar 24,4 persen dan 16,1 persen. Persentase wanita kawin usia muda cukup bervariasi antar Propinsi. Persentase Wanita kawin usia muda, persentase terendah terdapat pada Propinsi NTT (4,35%), Bali (4,54%) dan Kaliman Selatan (37,5%).

Status perkawinan. Komposisi penduduk 10 tahun keatas di kota maupun desa menurut status perkawinan di Indonesia menunjukkan bahwa penduduk pria dan wanita mengalami perubahan status perkawinannya. Pada tahun 1990 persentase penduduk wanita berumur 10 tahun keatas dengan status kawin 54,2%, belum kawin 33,4%, cerai hidup 3,1% dan cerai mati 9,3%. Sedangkan penduduk pria dengan status kawin 53,4%, belum kawin 43,9%, cerai hidup 1,0%, cerai mati 1,6%. Bila dibandingkan dengan tahun 1996 persentase penduduk wanita berumur 10 tahun keatas dengan status kawin 54,88%, belum kawin 33,99%, cerai hidup 2,35% dan cerai mati 8,77%, sedangkan pada penduduk laki-laki status belum kawin 42,04%, kawin 55,69%, cerai hidup 0,69% dan cerai mati 1,58%.

Ratio Ibu/Anak. Perbandingan jumlah anak usia 0 – 4 tahun terhadap wanita usia subur (15 – 49 tahun) pada tahun 1971 adalah 667 anak per 100 wanita usia subur. Keadaan pada tahun 1990 dan tahun 1991 telah menurun dari 536 menjadi 460 anak per seribu wanita. Sedangkan keadaan pada tahun 1992, tahun 1994 dan tahun 1996 menjadi 448,427 dan 364.

Propinsi yang paling tinggi angka rasionya adalah Propinsi NTT, Sulawesi Tenggara, dan NTB, sedangkan yang paling rendah adalah Propinsi DKI Jaya, DI Yogyakarta dan Bali.

Rata-rata anak lahir hidup. Rata-rata anak yang pernah dilahirkan oleh wanita pernah kawin merupakan salah satu indikator yang biasa dipakai untuk mengukur tingkat kelahiran. Rata-rata anak yang pernah dilahirkan oleh wanita kawin usia 15-49 tahun 10 pada tahun 1994 dan pada tahun 1996 sebesar 2 orang anak.

Menimbang pemikiran di atas, maka sesungguhnya yang perlu dibenahi adalah pengembangan wilayah-wilayah sehingga antar daerah tidak terdapat perbedaan yang besar, yang pada akhirnya akan membuat perpindahan penduduk tidak terjadi secara besar-besaran dan persebaran penduduk menjadi merata.

Pertumbuhan Penduduk. Pertumbuhan penduduk (*population growth*) di suatu negara adalah peristiwa berubahnya jumlah penduduk yang disebabkan oleh adanya penambahan alami dan migrasi neto. Pertambahan alami (*natural increase*) adalah pertambahan penduduk yang diperoleh dari selisih antara jumlah kelahiran dan jumlah kematian.

Migrasi neto (*nett migration*) adalah pertambahan penduduk yang diperoleh dari selisih antara jumlah imigran dan jumlah emigran. Tingkat pertambahan alami sangat mempengaruhi pertumbuhan penduduk, biasanya dinyatakan dalam per mil ($^0/_{00}$). Misalnya : dengan fertilitas $45 ^0/_{00}$ dan mortalitas $21 ^0/_{00}$ berarti bahwa dalam tiap 1000 orang penduduk terdapat pertambahan alami sebesar 24 orang.

Pertumbuhan penduduk dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$P = (l - m) + (i - e)$$

Keterangan : l = jumlah kelahiran

m = jumlah kematian

i = jumlah imigran (orang yang datang)

e = jumlah emigran (orang yang pergi)

(l-m)= pertambahan alami

(i-e)= migrasi penduduk

Komponen-komponen Pertumbuhan Penduduk

1. Fertilitas = tingkat Kelahiran

Fertilitas yaitu suatu pengertian yang digunakan untuk menunjukkan tingkat pertambahan anak, artinya jumlah kelahiran tiap seribu orang penduduk pertahun.

Misal : dalam suatu negara yang berpenduduk 120 juta jiwa, terdapat kelahiran 5 juta jiwa dalam setahun, maka tiap seribu orang penduduk terdapat kelahiran sebesar :
$$\frac{5.000.000}{120.000.000} \times 1.000 = 42$$

maka dikatakan tingkat kelahiran di negara tersebut 42. bila suatu negara atau daerah memiliki tingkat kelahiran : 30 ke atas digolongkan tinggi

20-30 digolongkan sedang

di bawah 20 digolongkan rendah

Tingkat kelahiran seperti perhitungan diatas disebut tingkat kelahiran kasar (*Crude Birth Rate*). *Angka Kelahiran Kasar (CBR)* berdasarkan perkiraan yang dihitung Biro Pusat Statistik (BPS), menunjukkan bahwa Angka Kelahiran Kasar di Indonesia telah menurun dari 33,7 per 1000 penduduk pada periode 1980-1985 menjadi 28,7 per 1000 penduduk dan 25,3 per 1000 penduduk pada periode 1985-1990 dan 1990-1995.

Angka Kelahiran Total (TFR) berdasarkan hasil SUPAS tahun 1985, Angka Kelahiran Total (TFR) tahun 1980-1985 adalah 4,1 per wanita usia subur. Berarti dalam jangka waktu lima tahun tersebut angka ini mengalami penurunan sebesar 19,5 %. Sedangkan hasil Sensus 1990 menunjukkan bahwa TFR sebesar 3,3 per wanita usia subur. Pengelompokan propinsi menurut perkiraan TFR tahun 1990-1995 dan 1995-2000 seperti terlihat pada Tabel II.A.7 di atas, menunjukkan bahwa terjadi kenaikan jumlah propinsi yang mempunyai TFR kurang dari 3 sedangkan jumlah propinsi pada kelompok TFR diatas menurun. Bahwa angka kelahiran menurut kelompok umur ibu terjadi penurunan pada setiap periode akan tetapi penurunannya tidak secepat seperti pada periode tahun delapan puluhan. Hal ini disebabkan karena tingkat kelahiran pada saat ini sudah cukup rendah yaitu rata-rata setiap ibu usia 15-49 pada periode tahun 1992-1994 melahirkan anak sebesar 2,86 anak.

2. *Mortalitas = tingkat Kematian*

Mortalitas atau kematian merupakan salah satu komponen demografi yang dapat mempengaruhi perubahan penduduk. Tinggi rendahnya tingkat kematian akan dipengaruhi oleh struktur umu, jenis kelamin, jenis pekerjaan, status sosial ekonomi serta keadaan lingkungan dimana mereka berada. Bila suatu negara mempunyai mortalitas berkisar :

9-13 digolongkan rendah

14-18 digolongkan sedang

lebih dari 18 digolongkan tinggi

Untuk mengukur mortalitas, seperti mengukur fertilitas, yaitu mencari tingkat kematian kasar (Crude Death Rate), ialah angka yang menunjukkan jumlah kematian per 1.000 penduduk dalam periode tertentu.

3. Migrasi = Perpindahan

Perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain. Ada yang dilakukan secara perorangan, keluarga dan kelompok. Gejala perindahan penduduk ini disebabkan oleh berbagai alasan seperti ekonomi, politik, dan agama.

Selama 25 tahun terakhir jumlah penduduk Indonesia telah meningkat menjadi hampir dua kali yaitu dari 119,2 juta pada tahun 1971 menjadi 195,29 juta pada tahun 1995 dan menjadi 198,20 juta pada tahun 1996. namun demikian, tingkat pertumbuhan telah turun secara cepat yaitu 2,32 persen pada periode tahun 1971-1980 menjadi 1,98 persen pada periode tahun 1980-1990 dan pada periode tahun 1990-1996 menjadi 1,69 persen,

Terdapat perbedaan yang sangat mencolok tentang laju pertumbuhan penduduk bila dilihat menurut propinsi pada periode tahun 1990-1996. Angka terendah sebesar 0,01 persen pada propinsi DI Yogyakarta dan tertinggi sebesar 4,39 persen pada propinsi Kalimantan Timur. Dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan penduduk tingkat nasional terdapat 9 propinsi yang tingkat pertumbuhannya dibawah 1,69 persen, yaitu propinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan.

C. Peranan Pendidikan Dalam Mengatasi Kesenjangan Sosial

Ketika masyarakat dan negara kita dilanda krisis moneter yang tak kunjung terselesaikan, seolah-olah kita tersentak dan sadar bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam struktur masyarakat kita. Masyarakat resah, dimana-mana kita menemui anggota masyarakat yang kurang daya beli, penghasilannya berkurang, dan PHK. Banyak ahli berpendapat bahwa memang benar terjadi keresahan masyarakat yang cukup luas, yang kali ini bukan hanya menimpa orang berstatus kelas ekonomi bawah, tetapi juga menimpa kalangan menengah dan atas. Krisis moneter bukanlah faktor tunggal terjadinya keresahan dalam masyarakat, tetapi krisis moneter telah menjadi faktor yang mengaselerasi keresahan dalam masyarakat, sedangkan akar permasalahannya adalah faktor kesenjangan sosial yang

sudah sedemikian parahnya terstruktur dalam masyarakat, seperti dikemukakan sosiolog Prof. Sarjono Jatiman.

Ada permasalahan atau pertanyaan dalam dunia pendidikan yang memerlukan solusi atau paling tidak suatu kejelasan, yaitu; Apakah pendidikan selama ini telah berhasil mengurangi kesenjangan sosial? atau sebaliknya; Apakah pendidikan telah memperkuat sistem kesenjangan sosial yang hidup dalam masyarakat?

Dalam suatu tulisan yang berjudul *Education and Social Mobility: A Structure Model*, Raymond Boudon menyebutkan bahwa tidak ada suatu alasan untuk mengatakan angka pertumbuhan yang tinggi dalam pendidikan ada hubungannya dengan meningkatnya mobilitas sosial dan ekonomi. Bahkan ekspansi dalam bidang pendidikan dianggap telah mengukuhkan struktur mobilitas sosial. Selama ini kita ketahui bahwa akses terhadap pendidikan buat tiap lapisan masyarakat tidaklah sama. Orang-orang yang memiliki akses dalam ekonomi, sosial, dan budaya yang tinggi, besar pula aksesnya terhadap dunia pendidikan.

Peserta didik juga terdiferensiasi dalam lembaga-lembaga pendidikan tertentu berdasarkan latar belakang sosialnya. Perguruan tinggi tertentu identik dengan mahasiswa berlatarbelakang sosial dari kalangan atas, sedangkan perguruan tinggi tertentu pula identik mahasiswanya berasal dari kalangan bawah atau menengah. Seperti hasil penelitian yang penulis lakukan (1998) terhadap mahasiswa IKIP Bandung (sekarang UPI). Dari hasil yang didapatkan bahwa kebanyakan latar belakang stratifikasi sosial mahasiswa IKIP Bandung adalah mereka yang berasal dari kelas bawah dan menengah, hal ini dapat ditunjukkan dari tingkat pendidikan orang tuanya yang mayoritas berpendidikan dasar dan menengah (89,44%), serta tingkat jabatan pekerjaan orang tuanya adalah jabatan sebagai karyawan menengah dan bawah (hampir 80%). Juga tingkat penghasilan mengikuti pola yang sama, dimana sebagian besar orang tua mahasiswa berpenghasilan rendah (77,22%), hanya ada sekitar 1,95% mereka yang berpenghasilan tinggi. Begitu pula tingkat pengeluaran tiap bulannya yang tergolong rendah sebanyak 71,59%.

Begitu juga yang menyangkut kehidupan sosial peserta didik, seperti misalnya mahasiswa. Kehidupan mahasiswa tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kelompok sosial lainnya, artinya mereka dipengaruhi oleh kelompok sosial yang lain, juga mempengaruhi kelompok sosial yang lain. Seiring dengan tumbuhnya minat untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, tumbuh pula variasi kelompok sosial mahasiswa, dan tumbuh pula segregasi sosial kehidupan mahasiswa. Tumbuhnya segregasi sosial kehidupan mahasiswa tidak bisa dilepaskan dari latar belakang kelompok stratifikasi sosial orang tuanya. Seperti

dikemukakan oleh Kitsuse dan Cicourel (1979) bahwa ternyata orang tua memiliki sendiri aspirasi ke perguruan tinggi mana anaknya akan melanjutkan sekolah, dan aspirasi seperti ini ternyata kebanyakan diinternalisasi oleh siswa yang bersangkutan. Hal seperti ini telah membawa masalah kearah terjadinya proses diferensiasi dan stratifikasi sosial yang lebih besar dalam dunia pendidikan, yang mestinya dunia pendidikan adalah lembaga demokratis dan egaliter yang terbuka terhadap semua pihak .

Juga beberapa temuan lainnya disebutkan bahwa latar belakang intelektual siswa dikalahkan oleh sifat-sifat "*non-intellective*" dalam melanjutkan pendidikannya, seperti oleh latarbelakang pekerjaan orang tua, dan aspirasi umum tentang kehidupannya. Pertimbangan-pertimbangan seseorang melanjutkan ke perguruan tinggi tidak berdasarkan pada performa dan prestasi siswa, tetapi oleh pandangan-pandangan yang bersifat sosial, bersifat budaya, dan bersifat motivasional.

Latar belakang status sosial ekonomi mahasiswa membawa perbedaan terhadap kesempatan melanjutkan studinya. Seperti temuan Halsey (1975), menyebutkan pula bahwa anak-anak yang terlahir dari orang tua yang melakukan profesi dan pekerjaan pada tingkat manajemen seperti : dokter, manajer bank, hakim, atau direktur perusahaan, memperlihatkan peluang yang lima kali lebih besar untuk melanjutkan sekolah ke pendidikan tinggi , sementara anak-anak dari pekerjaan bawahan memiliki rata-rata peluang hanya seperempat. Hasil penelitian William H. Sewel dan Vimal P. Shah yang diberi judul *Socioeconomic Status, Intelligence, and the Attainment of Higher Education* memperlihatkan adanya perbedaan dalam rencana melanjutkan pendidikan dan penyelesaian pendidikan tinggi dari kelas sosial dan tingkat intelegen yang berbeda .

Bukti - bukti telah memperlihatkan kepada kita bahwa sekolah atau dunia pendidikan telah menjadi semacam tempat reproduksi sosial dan budaya dari kelompok atau golongan-golongan sosial yang ada di masyarakat .

Salah satu bentuk dari representasi reproduksi sosial dan budaya dalam dunia pendidikan ialah tumbuhnya macam-macam gaya hidup di kalangan mahasiswa. Secara khusus di dunia pendidikan tinggi - pun berkembang perbedaan - perbedaan gaya hidup dari mahasiswanya. Bourdie (1973) dalam penelitiannya memperlihatkan bahwa latarbelakang stratifikasi sosial yang berbeda , seperti anak-anak petani, para pedagang kecil , atau anak para pegawai rendah ternyata mereka terbebas dari partisipasi "high culture". Kategori "high culture" seperti membaca, "theatre, concert, art cinema", dan "museum attendance" ternyata telah menjadi semacam "cultural habits" bagi anak atau mahasiswa kelas menengah dan atas

. Begitu pula kelompok mahasiswa yang berasal kelompok sosial bawah, menengah dan atas memiliki perbedaan dalam belanja uang untuk keperluan buku-buku, dan perbedaan pula dalam jenis dan kuantitas buku yang dimilikinya.

Berbagai temuan empiris tentang kehidupan sosial dan pendidikan memperlihatkan bahwa orang-orang yang berasal dari status sosial bawah memiliki kesempatan yang kurang untuk larut dalam dunia pendidikan, karena dunia pendidikan telah dipenuhi oleh kehidupan sosial dan budaya kalangan atas. Orang-orang yang berasal dari kalangan sosial atas lebih siap untuk memasuki dunia pendidikan, karena bagi mereka tidak memerlukan lagi adaptasi sosial dan budaya karena budaya sosial pendidikan adalah telah menjadi milik mereka, sedangkan bagi orang-orang yang berlatarbelakang sosial kelas bawah mereka telah ketinggalan sejak awal untuk bersaing dengan kelompok orang-orang yang berasal dari kelas atas. Sikap-sikap dan kebiasaan-kebiasaan tertentu yang sudah menjadi trademark dunia pendidikan tidak dimiliki oleh kalangan bawah, sedangkan sikap-sikap dan kebiasaan dalam dunia pendidikan tersebut telah menjadi milik dari orang-orang dari kelas atas. Para peneliti telah menemukan bahwa kedudukan sosial seseorang terkait dengan suatu sikap dan nilainya, orientasi perilaku, dan perilakunya, seperti penelitian Kinsley, Pameroy, dan Merton (1948), Inkeles (1960).

Penelitian Demereth (1965) menunjukkan bahwa kelas menengah lebih sering mengunjungi tempat ibadah dibandingkan kelas bawah. Kelas menengah juga diindikasikan lebih sering aktif dalam organisasi voluntir, menonton konser, bermain olahraga, menggunakan waktu liburnya untuk rekreasi dibandingkan kelas di bawahnya. Hamilton (1964) melihat adanya perbedaan yang signifikan dalam orientasi politik, sikap terhadap masalah-masalah domestik dan luar negeri, sikap terhadap masalah pendidikan antara pekerja kantor dan pedagang, tetapi sebaliknya perbedaan tersebut hampir tidak ada antara pekerja yang jenjangnya berdekatan seperti antara mandor dan tukang.

D. Pembangunan Dalam Bidang Ketenagakerjaan

Masalah-masalah ketenagakerjaan yang sekarang mendesak sedang dihadapi, antara lain masalah pengangguran, masalah pengiriman TKI ke luar negeri, masalah hubungan industrial, dan masalah peraturan ketenagakerjaan (Payaman J. Simajuntak, 2004).

Masalah Pengangguran

Jumlah pengangguran terus bertambah dan sekitar 4,5 juta orang atau 5 % pada tahun 1997 (menjelang krisis ekonomi), menjadi sekitar 6,5 juta orang atau 7% pada tahun 2000, dan menjadi 9,5 juta orang atau sekitar 9,5% pada 2003. Begitu juga untuk orang yang setengah pengangguran meningkat dari 29 juta (1997) menjadi 31 juta orang pada tahun 2000 dan 2003.

Masalah Pengiriman TKI ke Luar Negeri

Kasus- kasus pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar luar negeri terus meningkat. Mulai dari tahap perekrutan, persiapan keberangkatan, perlindungan selama bekerja di luar negeri, hingga saat kembali ke tanah air. Pengiriman TKI secara ilegal dan deportasi telah menambah kompleksitas permasalahan yang menguras banyak tenaga dan waktu.

Masalah Hubungan Industrial

Hubungan industrial di Indonesia akhir-akhir ini terkesan tidak kondusif. Gelombang pemogokan merupakan peristiwa yang kita saksikan hampir setiap hari. Banyak investor dalam dan luar negeri yang merasa kurang aman menanamkan modalnya di Indonesia.

Masalah Peraturan Ketenagakerjaan

Beberapa pihak menganggap bahwa peraturan perundangan di Indonesia sangat kompleks. Harus diakui, bahwa semua negara di dunia, peraturan ketenakerjaan itu kompleks, karena dimaksudkan untuk melindungi banyak kepentingan. Bukan hanya untuk melindungi kepentingan pengusaha dan tenaga kerja, akan tetapi juga untuk melindungi kepentingan pemerintah dan masyarakat konsumen, bahkan dapat menyangkut hubungan antar negara.

1. Gaji/Upah Pekerja

Dalam dunia kerja, yang dimaksud dengan pekerja atau buruh ialah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Sedangkan pemberi kerja ialah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Untuk mengatur hubungan antara pekerja (buruh) dengan pemberi kerja, pemerintah mengeluarkan Undang-undang Ketenagakerjaan. Tujuan dibuatnya Undang-undang Ketenagakerjaan ialah untuk:

- a. memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi;
- b. mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah;
- c. memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan; dan
- d. meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

Dalam Bab X Bagian Kedua pasal 88 UU Ketenagakerjaan diatur beberapa hal berikut ini:

- a. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- b. Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh.
- c. Untuk mencapai kebutuhan hidup yang layak bagi kemanusiaan, pemerintah menetapkan upah minimum. Upah minimum terdiri atas dua jenis, yakni:
 - upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota;
 - upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota.

Upah minimum diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak sesuai dengan daerahnya masing-masing. Oleh karena itu, upah minimum pekerja pada setiap daerah (provinsi) atau kabupaten/kota belum tentu sama. Upah minimum untuk DKI Jakarta akan berbeda dengan upah minimum untuk Daerah Istimewa Jogjakarta misalnya. Hal ini sangat dipengaruhi oleh kelayakan standar hidup di daerah masing-masing. Semakin tinggi kelayakan standar hidup suatu daerah, semakin tinggi upah minimum regionalnya.

Upah minimum ini ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan atau Bupati/Walikota.

Selain pengupahan yang diatur dalam Undang-undang Ketenagakerjaan, ada lagi bentuk pengupahan berdasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak (pekerja dan pemberi kerja). Akan tetapi, pengupahan berdasarkan kesepakatan ini tidak boleh lebih rendah dari peraturan perundangan yang berlaku. Apabila dalam kesepakatan itu terjadi pengupahan yang lebih rendah dari peraturan perundangan yang berlaku, maka

kesepakatan tersebut batal demi hukum, dan pengusaha yang bersangkutan wajib membayar upah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam memberikan upah, pengusaha menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi. Pengusaha juga melakukan peninjauan upah secara berkala dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas.

Pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah, dikenakan denda sesuai dengan persentase tertentu dari upah pekerja/buruh.

Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya.

Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi daluarsa setelah melampaui jangka waktu dua tahun setelah timbulnya hak.

Kesejahteraan

Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. Jaminan sosial tenaga kerja tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja/buruh dan keluarganya, pengusaha wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan. Penyediaan fasilitas kesejahteraan tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pekerja/buruh dan ukuran kemampuan perusahaan.

Dalam pasal 101 UU Nomor 13 tahun 2003 dinyatakan:

- (1) Untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh, dibentuk koperasi pekerja/buruh dan usaha-usaha produktif di perusahaan.
- (2) Pemerintah, pengusaha, dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh berupaya menumbuhkembangkan koperasi pekerja/buruh, dan mengembangkan usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Pembentukan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Upaya-upaya untuk menumbuhkembangkan koperasi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Perlindungan Pekerja

Setiap pekerja wajib melakukan pekerjaan yang dituntut perusahaan sesuai dengan perjanjian kerja (kontrak kerja). Akan tetapi, ia juga memiliki hak perlindungan dari perusahaan.

Apa saja hak-hak perlindungan pekerja/buruh dari perusahaan itu?

a. Bagi Penyandang Cacat

Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya. Pemberian perlindungan tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Bagi Pekerja Anak

Pengusaha dilarang mempekerjakan anak, kecuali anak usia 13 sampai dengan 15 tahun. Untuk anak usia 13 sampai dengan 15 tahun pekerjaan yang diberikan harus pekerjaan ringan dan tidak boleh mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial mereka.

Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) izin tertulis dari orang tua atau wali;
- 2) perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
- 3) waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
- 4) dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
- 5) keselamatan dan kesehatan kerja;
- 6) adanya hubungan kerja yang jelas;
- 7) menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Apabila anak dipekerjakan dengan orang dewasa, maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja orang dewasa.

Siapa pun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk, yakni:

- 1) segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;

- 2) segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;
- 3) segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau
- 4) semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, dan atau moral anak.

c. Bagi Pekerja Wanita

Perlindungan bagi pekerja wanita diatur seperti berikut:

- (1) Pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 s.d. 07.00.
- (2) Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 s.d. pukul 07.00.
- (3) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 s.d. pukul 07.00 wajib:
 - a. memberikan makanan dan minuman bergizi; dan
 - b. menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja.
- (4) Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/ buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 s.d. 05.00.

Selain perlindungan khusus seperti di atas, terdapat pula bentuk perlindungan lain bagi pekerja/buruh secara umum, yakni:

a. Waktu Kerja

Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja.

Waktu kerja bagi para pekerja/buruh meliputi:

- 1) 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam satu minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu;
- 2) 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana tersebut di atas, harus memenuhi syarat:

- 1) ada persetujuan dari pekerja/buruh tersebut;

- 2) waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu.

Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja di atas wajib membayar upah kerja lembur.

b. Waktu Istirahat dan Cuti

Pengusaha wajib memberikan waktu istirahat dan cuti kepada pekerja/buruh. Waktu istirahat yang dan cuti yang dimaksud ialah:

- 1) istirahat antara jam kerja, sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ jam setelah bekerja selama 4 jam terus-menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja;
- 2) istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu;
- 3) cuti tahunan, sekurang-kurangnya 12 (dua belas) hari kerja setelah pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus;
- 4) istirahat panjang, sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan dan dilaksanakan pada tahun ketujuh dan kedelapan, masing-masing 1 (satu) bulan bagi pekerja/buruh yang telah bekerja selama 6 (enam) tahun secara terus-menerus pada perusahaan yang sama dengan ketentuan pekerja/buruh tidak berhak lagi atas istirahat tahunannya dalam 2 (dua) tahun berjalan dan selanjutnya berlaku untuk setiap kelipatan masa kerja 6 (enam) tahun.

Istirahat panjang tersebut berlaku pada perusahaan tertentu yang diatur dengan Keputusan Menteri.

c. Melaksanakan ibadah

Pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secukupnya kepada pekerja/buruh untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya.

d. Pekerja Wanita

- 1) Pekerja/buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid.

- 2) Pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat 1.5 (satu setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1.5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan.
- 3) Pekerja/buruh perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat 1.5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan.
- 4) Pekerja/buruh perempuan yang anaknya masih menyusu harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja.

Setiap pekerja yang menggunakan waktu istirahat dan cuti sebagaimana diuraikan di atas berhak mendapat upah penuh.

Pada hari-hari libur resmi, pekerja/buruh tidak wajib bekerja. Apabila perusahaan mempekerjakan pekerja/buruh pada hari libur resmi karena pekerjaannya menuntut harus dikerjakan harus dengan persetujuan pekerja/buruh dan ia wajib membayar upah lembur.

Sebab-sebab Pemutusan Hubungan Kerja

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dapat dilakukan oleh pengusaha apabila pekerja/buruh telah terbukti melakukan kesalahan berat. Beberapa kesalahan berat dimaksud ialah:

- a. pekerja/buruh melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan/atau uang milik perusahaan;
- b. pekerja/buruh memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan;
- c. mabuk, minum minuman keras yang memabukkan, memakai dan atau mengedarkan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan kerja;
- d. melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja;
- e. menyerang, menganiaya, mengancam atau mengintimidasi teman sekerja atau pengusaha di lingkungan kerja;
- f. membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- g. dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan;

- h. dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau pengusaha dalam keadaan bahaya di tempat kerja;
- i. membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara; atau
- j. melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Pemutusan Hubungan Kerja bisa dilakukan atas permintaan dari pekerja/buruh secara tertulis kepada perusahaan. Selain itu, perusahaan juga dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja apabila terjadi perubahan status, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan dan pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja atau perusahaan tidak mau menerima pekerja/buruh tersebut.

Terhadap pemutusan hubungan kerja karena alasan perubahan status, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan, pekerja/buruh berhak mendapatkan pesangon. Apabila pekerja/buruh mengundurkan diri, ia berhak mendapatkan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Sedangkan, PHK karena pekerja/buruh melakukan pelanggaran berat, maka pekerja/buruh berhak atas uang penggantian hak yang seharusnya diterima.

Apabila pengusaha menutup perusahaannya karena *force majeure* (keadaan darurat) atau rugi terus-menerus dalam waktu 2 tahun, maka pekerja/buruh berhak atas uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja.

Prioritas Program Ketenagakerjaan

Dalam rangka meningkatkan kualitas ketenagakerjaan serta untuk mengimbangi tuntutan pekerja di pasar global, pemerintah melakukan prioritas pembangunan ketenagakerjaan seperti berikut ini:

- a. *Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja*, diarahkan untuk mendorong, memasyarakatkan dan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pelatihan kerja, agar tersedia tenaga kerja yang berkualitas, produktif dan berdaya saing sehingga mampu mengisi pasar kerja dalam negeri maupun luar negeri.

Diharapkan, para pencari kerja akan memperoleh atau menciptakan lapangan kerja baru dan bagi para pekerja mampu mengembangkan usahanya yang pada gilirannya akan menyerap tenaga kerja baru.

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja meliputi:

- Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan sektor lain, Pemerintah Daerah, Lembaga Masyarakat dan stakeholder lainnya dalam upaya memperoleh dukungan dalam pelaksanaan peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.
- Pengembangan standarisasi dan sertifikasi kompetensi; pembinaan dan pemberdayaan lembaga pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Swasta ataupun perusahaan; pemasyarakatan nilai dan budaya produktif, pengembangan sistem dan metoda peningkatan produktivitas serta pelatihan kader dan tenaga ahli produktivitas.
- Penyelenggaraan pelatihan institusional di 30 propinsi (11.520 orang) dan pelatihan non-institusional/MTU di 30 propinsi (15.360 orang) baik untuk melatih pencari kerja, pekerja, assosiasi profesi, tokoh masyarakat ataupun LSM di perkotaan dan pedesaan;
- Penyelenggaraan pelatihan manajemen dan produktivitas melalui kemitraan dan kerjasama dengan swasta dan perusahaan di 30 propinsi (1.750 orang);
- Pemagangan 1.920 orang tenaga kerja ke luar negeri dan 960 orang di dalam negeri;
- Pengembangan pendidikan dan pelatihan instruktur jasa dan manufaktur serta tenaga pelatihan 1.500 orang.
- Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Fungsional (190 orang);
- Peningkatan sarana prasarana pelatihan di 25 BLK; serta bimbingan, sosialisasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program

b. Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja, diarahkan untuk mendorong, memfasilitasi dan mengembangkan perluasan kesempatan kerja di berbagai bidang usaha, melalui penciptaan tenaga kerja mandiri, peningkatan dan pemberdayaan kewirausahaan dan pelayanan penempatan tenaga kerja di dalam dan di luar negeri serta pelayanan dan penyediaan informasi bursa kerja, sehingga akan mengurangi pengangguran baik di pedesaan maupun di perkotaan.

Melalui pelaksanaan program ini, diharapkan akan terserap sejumlah 370.000 tenaga kerja yang terdiri dari di dalam negeri sejumlah 70.000 orang dan ke luar negeri sejumlah 300.000 orang.

- ❑ *Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja*, diarahkan untuk meningkatkan perlindungan bagi pekerja dan pengusaha melalui pemasyarakatan, fasilitasi dan penciptaan ketenagaan dalam bekerja dan berusaha; peningkatan kenyamanan, keselamatan dan kesehatan bekerja, sehingga tercipta hubungan yang harmonis antara pekerja dan pengusaha yang akan meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya serta berkembangnya usaha, yang pada gilirannya akan menyerap tenaga kerja baru. Kegiatan di prioritaskan bagi penyelesaian dan sosialisasi peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

LATIHAN

1. Jelaskan problem-problem kependudukan apa saja yang dihadapi oleh negara kita ?
2. Apakah pendidikan telah berhasil mengatasi kesenjangan sosial yang ada ? Jelaskan !
3. Jelaskan beberapa program dalam pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia !
4. Ambil salah satu kasus perselisihan perburuhan yang bisa anda ambil dari sumber media massa atau internet. Analisis kasus tersebut dengan pendekatan interdisipliner !

GLOSARIUM

- Discovery : penemuan unsur kebudayaan baru
Gaya hidup : Cara pandang, sikap , dan perilaku.

- Globalisasi : adalah suatu proses terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia, yang bertujuan untuk mengikuti sistem dan kaidah-kaidah tertentu yang sama
- Guncangan budaya (*culture shock*) : guncangan budaya terjadi apabila warga masyarakat mengalami disorientasi dan frustrasi.
- Invention : pengembangan dari discovery
- Inovasi : proses pembaharuan
- Kesenjangan social : Jarak antara kelas-kelas sosial yang ada dalam masyarakat.
- Ketimpangan budaya (*culture lag*) : perubahan unsur-unsur sosial budaya yang terjadi dalam masyarakatnya tidak terjadi secara serempak.
- Migrasi : Perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain, ada yang dilakukan secara perorangan, keluarga dan kelompok
- Migrasi neto (*nett migration*) : adalah pertambahan penduduk yang diperoleh dari selisih antara jumlah imigran dan jumlah emigran.
- Mortalitas : kematian merupakan salah satu komponen demografi yang dapat mempengaruhi perubahan penduduk
- Perubahan sosial : Setiap perubahan yang terjadi dalam struktur masyarakat atau perubahan dalam organisasi sosial dan hubungan sosial .
- Pertumbuhan penduduk (*population growth*): adalah peristiwa berubahnya jumlah penduduk yang disebabkan oleh adanya pertumbuhan alami dan migrasi neto
- Pola Linear : Perubahan selalu berubah dari yang sederhana ke arah yang lebih kompleks, selalu berubah menuju ke arah kemajuan.
- Pola siklus : masyarakat berkembang laksana sebuah roda. Pada suatu saat ada di atas, saat lain ada di bawah
- Stratifikasi sosial : Tinggi rendahnya status seseorang dalam masyarakat.
- Segregasi sosial : pengelompokan sosial seseorang atau kelompok masyarakat.
- Teori Ketergantungan (*Dependencia*): Teori ini berpandangan bahwa berdasarkan pengalaman kepada negara-negara Amerika Latin telah terjadi perkembangan dunia yang tidak merata.
- Teori Modernisasi : Teori ini berpandangan bahwa negara-negara terbelakang akan meniru seperti apa yang telah dilakukan oleh negara-negara industri maju

Toeri Sistem Dunia : Toeri ini berpandangan bahwa perekonomian kapitalis dunia terbagi atas tiga jenjang, yaitu: negara-negara inti, negara-negera semi periferi, dan negara-negara periferi.

